

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ponorogo, sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia, dikenal sebagai kota dengan kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Dikenal dengan julukan “Kota Reog,” Ponorogo memiliki beragam festival dan kegiatan budaya yang menarik wisatawan. Selain nilai sejarah dan budayanya, Ponorogo juga menghadapi tantangan dalam hal pengembangan infrastruktur, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas umum seperti pedestrian jalan. Pembangunan pedestrian jalan di Ponorogo merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki. Infrastruktur pedestrian yang memadai dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan aksesibilitas ke berbagai fasilitas umum. Pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kualitas jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki dan mendukung gaya hidup sehat. Proyek pembangunan pedestrian jalan di Ponorogo diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya pedestrian yang baik, kawasan komersial dan pusat-pusat aktivitas lainnya akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan pengunjung, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan berkelanjutan.

Jalur pedestrian adalah tempat yang dirancang dan ditetapkan khusus untuk pejalan kaki agar dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan nyaman. Tujuan utama dari jalur pedestrian adalah untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Selain itu, jalur pedestrian juga berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki. Jalur pedestrian tidak hanya merupakan ruang fisik, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam bagi manusia. Jalur pedestrian memiliki pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jalur pedestrian menciptakan suasana yang memungkinkan interaksi sosial antara orang-orang yang melintas di sekitarnya. Sebagai ruang publik, jalur pedestrian menciptakan tempat-tempat di mana orang dapat berinteraksi, saling bertemu, dan berkomunikasi satu sama lain (Iwanto, 2006).

Menurut ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 131 dijelaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak untuk memperoleh fasilitas yang mendukung, seperti trotoar, lintasan penyeberangan, dan fasilitas lainnya (Witanto, 2022). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PU) No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, dalam Pasal 1 poin 3 Bab 1 Ketentuan Umum, Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki didefinisikan sebagai fasilitas yang disediakan sepanjang jalur pejalan kaki dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki meliputi berbagai elemen yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan dan interaksi pejalan kaki di lingkungan perkotaan serta dapat mencakup berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti penerangan jalan yang memadai, tanda-tanda peringatan, tempat duduk, dan fasilitas penunjang lainnya. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki, mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas, dan mendorong mobilitas berkelanjutan di perkotaan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan, 2014)

Tata kelola perkotaan dapat dianggap sebagai suatu proses yang terbentuk melalui hasil interaksi antara berbagai aktor (DLH, BAPPEDA, PUPR, DISHUB, SATPOL PP, BUPATI) yang terlibat dalam pembangunan kota. Dalam proses ini, para aktor pembangunan secara bersama-sama membahas dan memutuskan bagaimana merencanakan, membiayai, dan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan perkotaan. Para aktor saling berinteraksi dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam merencanakan perkembangan kota, mengalokasikan sumber daya keuangan yang diperlukan, serta mengelola dan mengoordinasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perkotaan (Hadimoeljono, 2017).

Keputusan yang diambil oleh para aktor pembangunan berkaitan dengan aspek-aspek penting seperti perencanaan tata ruang, transportasi, infrastruktur, penataan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup penduduk kota. Dalam konteks yang lebih luas, tata kelola perkotaan juga melibatkan pengaturan regulasi, mekanisme pengawasan, dan partisipasi publik dalam proses pembangunan kota. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola

yang efektif, transparan, inklusif, dan berkelanjutan bagi perkembangan kota yang lebih baik (Hadimoeljono, 2017).

Seperti yang dilakukan pemerintah Ponorogo yaitu Bupati Sugiri Sancoko dalam masa jabatannya membuat program pembangunan pedestrian jalan Hos Cokroaminoto. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperindah tampilan kota, menciptakan daya tarik wisata di kawasan kota, dan diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di area tersebut. Kabupaten Ponorogo berencana memiliki suatu lambang pejalan kaki yang mencerminkan karakteristik budaya Ponorogo, dengan harapan dapat menjadi pusat perdagangan dan bisnis (*Central Business District/CBD*), pusat pendidikan, dan pusat perbankan, serta memberikan dorongan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (Ahmad & Wafa, 2023). Setelah sukses menghadirkan perubahan pada Jalan HOS Cokroaminoto, proyek berikutnya mencakup pengembangan pedestrian di sisi selatan Jalan Jendral Sudirman dan sisi utara Jalan Urip Sumoharjo. Penambahan fasilitas seperti lampu penerangan bertema reog, taman, dan pepohonan akan memberikan wajah baru pada sepanjang jalan ini. Sebagai tindak lanjut dari pembongkaran median jalan, pemerintah menerapkan arus lalu lintas satu arah.

Sehubungan dengan hal tersebut peran seorang kepala daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemajuan perkembangan daerah yang dipimpinnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah di masa yang akan datang. Sebagai pemegang peran kunci dalam pengembangan infrastruktur lokal, Bupati memiliki tanggung jawab besar dalam proses pembangunan pedestrian jalan. Sehingga topik yang diangkat akan mendalami lebih jauh tentang pembangunan pedestrian jalan dan citra politik seorang Bupati Sugiri Sancoko.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Ponorogo dalam pembangunan pedestrian jalan?
2. Bagaimana perencanaan pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana citra politik Bupati Sugiri Sancoko setelah pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota di Kabupaten Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan pedestrian jalan
2. Mengetahui perencanaan pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota di Kabupaten Ponorogo.
3. Mengetahui citra politik Bupati Sugiri Sancoko setelah pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota di Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan kota dan kepemimpinan lokal

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Pedestrian Jalan

Pengguna jalan pejalan kaki, yang dikenal juga sebagai pedestrian, memiliki sejarah yang berakar pada masa pemerintahan Yunani kuno. Istilah “pedestrian” berasal dari kata “*pedos*” yang berarti “kaki” dalam bahasa Yunani, dan sering kali diartikan sebagai seseorang yang berjalan kaki. Istilah “pedestrian” juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “*pedester-pedestris*” yang merujuk pada seseorang sebagai pejalan kaki. Pedestrian juga dapat diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan manusia dari satu tempat (*origin*) ke tempat lain (*destination*) dengan berjalan kaki (Purwantiasning, 2013).

Jalur pedestrian adalah area khusus yang menarik untuk berbagai kegiatan sosial, perkembangan jiwa dan spiritual, seperti nostalgia, pertemuan spontan, rekreasi, saling bertegur sapa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jalur pedestrian merupakan ruang atau jalur yang dirancang khusus bagi pejalan kaki. Jalur pedestrian dapat berupa trotoar,

pavement, sidewalk, pathway, plaza, dan mall. Jenis-jenis ini menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki untuk beraktivitas di tengah perkotaan (Purwantiasning, 2013).

2. Citra Politik

Citra politik sering dijelaskan sebagai ranah yang mencakup unsur-unsur seperti pengaruh, wewenang, kekuasaan, kekuatan, kerjasama, konflik, dan kompromi. Dalam konteks ini, kekuasaan dianggap sebagai elemen kunci dalam analisis politik. Dalam dinamika politik, kekuasaan memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi, yakni kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain. Definisi kekuasaan juga merujuk pada hubungan sosial individu atau kelompok, terutama dalam konteks politik, di mana kekuasaan berkaitan dengan pengaruh, wewenang, dan kekuatan (Pratiwi, 2018).

Pencitraan politik yang dimaksud merujuk pada strategi pencitraan yang diterapkan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, media sosial, media tradisional, dan *public relations*. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan serta menguatkan pesan politik, dengan harapan dapat membentuk pandangan dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, diinginkan agar masyarakat tidak hanya mendukung, tetapi bahkan memilihnya ketika pemilihan umum dilakukan (Rahayu Ramadani & Mifda Hilmiyah, 2019).

F. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala tindakan atau keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk diimplementasikan atau tidak. Pemerintah melakukan berbagai hal, seperti mengatur konflik di dalam masyarakat, mengoordinasikan konflik dengan masyarakat lain, memberikan berbagai jenis penghargaan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat, dan mengumpulkan dana dari masyarakat, biasanya dalam bentuk pajak. Dengan demikian, kebijakan publik dapat meliputi pengaturan perilaku, pembentukan struktur birokrasi, distribusi manfaat, pemungutan pajak, atau melibatkan kombinasi dari semua hal tersebut secara bersamaan (Dye, 2013).

Terdapat berbagai model implementasi kebijakan publik yang telah dikembangkan, salah satunya diperkenalkan oleh Edward III pada tahun 1980. Edward (1980) memulai kajiannya dengan merumuskan dua pertanyaan pokok, yakni: 1) faktor-faktor apa yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor-faktor apa yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari kedua pertanyaan tersebut, tersusun model implementasi yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil atau kegagalan implementasi kebijakan (Ratri, 2014).

a. Struktur birokrasi

Kewenangan mencakup otoritas atau legitimasi yang diberikan kepada pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, seperti yang dijelaskan oleh Afandi dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kewenangan ini erat kaitannya dengan struktur birokrasi yang melekat pada tingkat atau posisi kelembagaan tertentu, baik pada tingkat organisasi secara keseluruhan maupun pada tingkat individu yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Salah satu ciri khas utama dari birokrasi umumnya tercermin dalam prosedur kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dalam fragmentasi organisasi. Dengan demikian, aspek kewenangan tidak hanya berkaitan dengan legitimasi politik tetapi juga terkait erat dengan struktur dan tata kelola organisasi secara keseluruhan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

b. Komunikasi

Komunikasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang melibatkan penyampaian informasi dari pihak yang berkomunikasi kepada pihak penerima pesan. Ketika membicarakan komunikasi kebijakan, hal tersebut merujuk pada proses pengiriman informasi kebijakan dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana kebijakan. Proses ini menekankan pentingnya mentransmisikan arahan dan kebijakan secara efektif, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Wardiana *et al.*, 2021). Informasi perlu diberikan kepada para pembuat kebijakan agar mereka dapat memahami esensi, tujuan, arah, serta kelompok sasaran dari kebijakan yang dibuat.

Dengan pemahaman ini, para pembuat kebijakan dapat merencanakan persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif, sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

c. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci yang memengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi. Dalam pandangan Edward III, SDM atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus mencukupi dan memiliki keahlian yang memadai. Dengan kata lain, SDM perlu memenuhi standar jumlah yang memadai dan memiliki tingkat kecakapan serta keahlian yang diperlukan. Sumber daya keuangan, yang juga memiliki dampak signifikan pada implementasi kebijakan, adalah sumber daya anggaran. Keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan program, dan keterbatasan dana yang tersedia juga dapat mempengaruhi mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat (Putri Suciana & Gun Gun Gumilar, 2022).

Sumber daya fasilitas, yang meliputi fasilitas fisik seperti gedung, lahan, dan sarana lainnya, merupakan elemen yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Peralatan tersebut memainkan peran penting dalam memberikan layanan selama pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan fasilitas dapat mengurangi motivasi para pelaku kebijakan dalam menjalankan tugas mereka. Sumber daya informasi dan wewenang, menurut Edward terdiri dari dua bentuk informasi, yang pertama adalah informasi terkait dengan cara melaksanakan suatu kebijakan seperti panduan pelaksanaan, tahapan, proses, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan jelas. Bentuk informasi yang kedua adalah data mengenai kepatuhan personil lain terhadap regulasi pemerintah (Putri Suciana & Gun Gun Gumilar, 2022).

d. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai "kesediaan, keinginan, dan kecenderungan dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai." Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien, pelaksana kebijakan tidak hanya perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan yang kuat dalam melaksanakan kebijakan tersebut (Nurlailah, 2021). Faktor-faktor yang perlu diperhatikan terkait disposisi dalam implementasi kebijakan meliputi:

- 1) Proses pengangkatan di dalam birokrasi. Sikap atau disposisi para pelaksana dapat menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan jika personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari pejabat-pejabat di tingkat lebih tinggi.
- 2) Insentif dianggap sebagai salah satu strategi yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Prinsipnya, orang cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka, sehingga manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan dapat memengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan.

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam memengaruhi masa depan, dengan konsekuensi-konsekuensi seperti fokus pada pengembangan kapasitas, melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dan energi yang diperlukan untuk menciptakan perubahan. Ini mencakup keadilan, mengingat bahwa penekanan yang berlebihan pada kelompok tertentu dapat merusak kesatuan masyarakat dan mengurangi. Selain itu, pertumbuhan kekuasaan dan wewenang tertentu dapat membawa manfaat pembangunan (Bryant Coralie and White Louise G., 1982). Perencanaan sebagai suatu proses yang berkelanjutan, melibatkan pengambilan keputusan dan pilihan dari berbagai alternatif penggunaan sumber energi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang (Yunani, 2022).

Friedmann (1987) menyatakan bahwa perencanaan selalu melibatkan empat unsur utama, yaitu: (1) perencanaan sebagai suatu metode untuk mempertimbangkan isu-isu sosial dan ekonomi; (2) perencanaan selalu mengarah ke masa depan; (3) perencanaan menekankan hubungan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan; dan (4) perencanaan menonjolkan kebijakan dan program yang holistik. Dengan merinci keempat unsur yang disajikan oleh Friedmann, dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang berfokus pada kepentingan masa depan (Iqbal *et al.*, 2022).

3. Citra Politik

Pencitraan politik adalah strategi yang diterapkan oleh politikus dan partai politiknya dengan tujuan menciptakan kesan positif di mata publik. Pencitraan ini melibatkan upaya dalam media massa, media sosial, media tradisional, dan public relations untuk membentuk serta menguatkan pesan politik, dengan harapan dapat membentuk opini di kalangan masyarakat. Hasilnya diharapkan agar masyarakat cenderung mendukung dan bahkan memilih politikus atau partai tersebut dalam pemilihan umum (Anang Anas, 2017). Terdapat lima jenis citra yang digunakan politikus antara lain antara lain citra bayangan/ *mirror image*, citra yang berlaku/ *current image*, citra yang diharapkan/ *wish image*, citra perusahaan/ *corporate image*, citra serbaneka/ *multiple image*, citra penampilan/ *performance* (Tantono *et al.*, 2019).

Jefkinsf (Jefkins, 2003) memaparkan lima jenis citra tersebut yakni :

- a. Citra bayangan (*mirror image*), yang merupakan persepsi yang dimiliki oleh individu atau anggota organisasi terhadap pandangan yang dimiliki pihak luar terhadap organisasi tersebut.
- b. Citra yang berlaku (*current image*), yaitu gambaran atau pandangan yang diterima oleh pihak luar mengenai suatu organisasi pada saat ini.
- c. Citra yang diharapkan (*wish image*), merupakan citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya, citra ini diharapkan lebih positif atau menyenangkan dibandingkan dengan citra yang ada saat ini.
- d. Citra perusahaan (*corporate image*), mencakup citra keseluruhan suatu organisasi, tidak hanya terbatas pada citra tertentu.
- e. citra majemuk (*multiple image*) yang mencakup beragam persepsi hampir sebanyak jumlah pegawai yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut (Astutik, 2015).

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Empat Faktor Kebijakan Menurut Edward III (Ratri, 2014) :

- a. komunikasi menjadi aspek kunci yang berkaitan dengan cara pemerintah berkomunikasi serta sikap dan tindakan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

- b. Kedua, sumber daya menjadi faktor penting yang mencakup kesiapan dan kapabilitas pelaksana kebijakan dalam menjalankan implementasi kebijakan pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota Ponorogo.
 - c. Aspek ketiga adalah disposisi, yang mencakup kewenangan dan kesiapan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut. Disposisi ini memainkan peran vital dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif.
 - d. Terakhir, struktur birokrasi juga memiliki dampak signifikan, yang melibatkan kesesuaian instansi terkait yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota di Ponorogo.
2. Perencanaan pembangunan menurut John Friedman
- a. Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Friedman (1987) menjelaskan perencanaan adalah alat atau pendekatan yang membantu dalam mempertimbangkan secara sistematis masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuan dari perencanaan adalah untuk memberikan solusi atau strategi yang terorganisir dalam menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan dalam domain sosial dan ekonomi (Jhon Friedman, 1987).
 - b. Perencanaan merupakan suatu upaya yang selalu diarahkan ke masa depan, bertujuan untuk mencapai suatu target dengan merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan di waktu yang akan datang. Menurut Friedman (Jhon Friedman, 1987) Proses perencanaan melibatkan kegiatan terkoordinasi yang mencakup beberapa tahapan, termasuk penetapan tujuan, perumusan strategi, dan pengembangan rencana kerja. Dalam kerangka ini, penentuan tujuan menjadi landasan, diikuti dengan pembuatan strategi sebagai langkah-langkah utama yang mendukung pencapaian tujuan, dan akhirnya, pengembangan rencana kerja sebagai panduan operasional yang terinci. Sinergi aktivitas dalam perencanaan menciptakan suatu proses yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai hasil yang diinginkan di masa depan.
 - c. Perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Artinya, suatu proses yang dimulai dari menetapkan tujuan organisasi, merancang strategi secara komprehensif untuk mencapai tujuan

tersebut, dan merumuskan suatu sistem perencanaan yang terintegrasi. Friedman (1987) mengemukakan perencanaan bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan semua aspek pekerjaan di dalam organisasi, dengan harapan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan mengidentifikasi tujuan, merumuskan strategi, dan menyusun sistem perencanaan yang holistik, perencanaan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang terinformasi dan terarah dalam mencapai hasil yang diinginkan (Jhon Friedman, 1987).

- d. Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Program komprehensif adalah suatu inisiatif yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Artinya, program ini memperoleh penerimaan positif dari berbagai lapisan masyarakat karena merangkul aspek-aspek yang luas dan relevan dengan kebutuhan serta nilai-nilai mereka. Keberhasilan program komprehensif ditentukan oleh kemampuannya untuk memahami dan memenuhi beragam kepentingan dan harapan masyarakat (Iqbal *et al.*, 2022).
3. Fase Dalam pencitraan politik menurut (Rahayu Ramadani & Mifda Hilmiyah, 2019) :
- a. Representasi, Representasi dalam citra politik merujuk pada cara seorang pemimpin politik atau partai politik dipresentasikan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti iklan, video klip, atau wawancara. Representasi ini mencakup bagaimana citra politik seseorang atau suatu partai politik dibangun, dikomunikasikan, dan diterima oleh masyarakat. Melalui representasi ini, pemimpin politik atau partai politik berusaha mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap diri mereka, visi politik, dan nilai-nilai yang mereka usung. Representasi citra politik dapat memengaruhi opini publik dan persepsi terhadap pemimpin politik atau partai politik tersebut.
 - b. Ideologi, seperangkat keyakinan, nilai, dan pandangan yang membentuk landasan pemikiran dan tindakan seorang pemimpin politik atau partai politik. Ideologi politik ini dapat tercermin dalam berbagai aspek, seperti pidato, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemimpin politik atau partai politik.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena manusia atau sosial. Metode ini melibatkan penciptaan gambaran yang komprehensif dan kompleks, yang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif juga melibatkan pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan informan yang memberikan pandangan rinci tentang subjek. Ini dilakukan dalam konteks alamiah yang mencerminkan situasi yang nyata (Fadli, 2021)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada tiga lokasi, yaitu jalan Urip Sumoharjo, jalan Jendral Soedirman, jalan Hos Cokroaminoto, juga kantor insitusi terkait guna mendapatkan data yang akurat. peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana pembangunan pejalan kaki dapat ditingkatkan untuk mendukung kehidupan kota yang lebih baik.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah dan bupati. Pemerintah dan bupati sebagai subjek dalam penelitian ini memiliki alasan yang kuat karena mereka merupakan pemangku kebijakan dan pengambil keputusan utama terkait dengan pembangunan pedestrian jalan. Pemerintah daerah, yang dipimpin oleh bupati, memiliki peran sentral dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek infrastruktur seperti pembangunan pedestrian jalan. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive* dan *snowball*. *Purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu sehingga layak untuk dijadikan informan. Sedangkan *snowball* adalah teknik penentuan informan dimana subjek yang ada memberikan rujukan / referensi kepada informan lain. Adapun informan dalam penelitian ini:

a. BAPPEDA

Bappeda ponorogo layak dijadikan informan dalam penelitian ini karena sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda memiliki peran kunci dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan kebijakan

pembangunan, termasuk proyek pembangunan pedestrian jalan di wilayah kota Ponorogo. Mereka memiliki akses langsung terhadap informasi dan data terkait perencanaan dan implementasi proyek tersebut.

b. DLH

Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo dapat memberikan wawasan tentang potensi dampak lingkungan dari proyek pembangunan pedestrian, seperti perubahan pola lalu lintas, pengelolaan limbah konstruksi, dan pelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, dapat memberikan informasi tentang upaya mitigasi atau perlindungan lingkungan yang diintegrasikan dalam perencanaan proyek tersebut.

c. PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ponorogo sebagai lembaga pemerintah pusat yang memiliki mandat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk proyek-proyek jalan dan pejalan kaki. PUPR memiliki wewenang dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi proyek infrastruktur skala nasional maupun lokal.

d. DISHUB

Dinas Perhubungan Ponorogo memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan, dan pengaturan lalu lintas, serta pengembangan sarana transportasi yang melibatkan pejalan kaki. Dengan keterlibatan Dishub, penelitian dapat memastikan bahwa aspek-aspek teknis dan operasional yang berkaitan dengan mobilitas pejalan kaki diintegrasikan dengan baik dalam pemahaman tentang pembangunan pedestrian jalan.

e. PERDAGKUM

Dinas perdagangan Sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengembangan perdagangan lokal, Dinas perdagangan dapat membantu dalam mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan pedestrian terhadap komunitas lokal, termasuk efeknya terhadap pendapatan pedagang, pola konsumsi masyarakat, dan dinamika ekonomi mikro di kawasan tersebut.

f. SATPOL- PP

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas penegakan peraturan dan ketertiban umum, Satpol PP memiliki wewenang dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan

terhadap peraturan terkait dengan pembangunan pedestrian. Kolaborasi dengan Satpol PP penting untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait dalam implementasi kebijakan dan penanganan isu-isu yang muncul terkait dengan pembangunan pedestrian.

g. Masyarakat

Peran Masyarakat sebagai pemakai langsung infrastruktur pedestrian jalan. Melibatkan masyarakat sebagai informan dapat memberikan wawasan yang bernilai tentang bagaimana pembangunan pedestrian jalan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, baik dari segi aksesibilitas, keamanan, atau kenyamanan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yang merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung mengenai kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan secara langsung di jalan Urip Sumoharjo, jalan Hos Cokroaminoto, jalan Jendral Soedirman dan kantor instansi terkait dengan kurun waktu kurang lebih dua bulan. Fokus observasi menemukan pelanggaran yang terjadi di lapangan sehingga mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. Peneliti juga menggunakan memo dan diary sebagai alat bantu observasi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan secara langsung (*face to face*) dengan informan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka sehingga peneliti lebih bebas mengembangkan pertanyaan. Dengan demikian mudah untuk menemukan permasalahan secara gamblang.

c. Dokumentasi

Istilah dokumentasi berasal dari kata “dokumen”, yang dalam bahasa Belanda disebut “document” dan dalam bahasa Inggris disebut “*document*”. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah “*document*” dapat berfungsi sebagai kata kerja (*to document*)

dan kata benda (document). Kata kerja “*to document*” mengacu pada tindakan menyediakan dokumen atau membuktikan dengan menggunakan dokumen. Sebagai kata benda, “dokumen” merujuk pada medium yang berisi informasi dan data yang direkam atau tercetak, dan digunakan untuk tujuan seperti pembelajaran, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dokumen dapat memiliki konotasi yang berbeda dan mencakup ruang lingkup yang sedikit berbeda pula (Purwono, 2017).

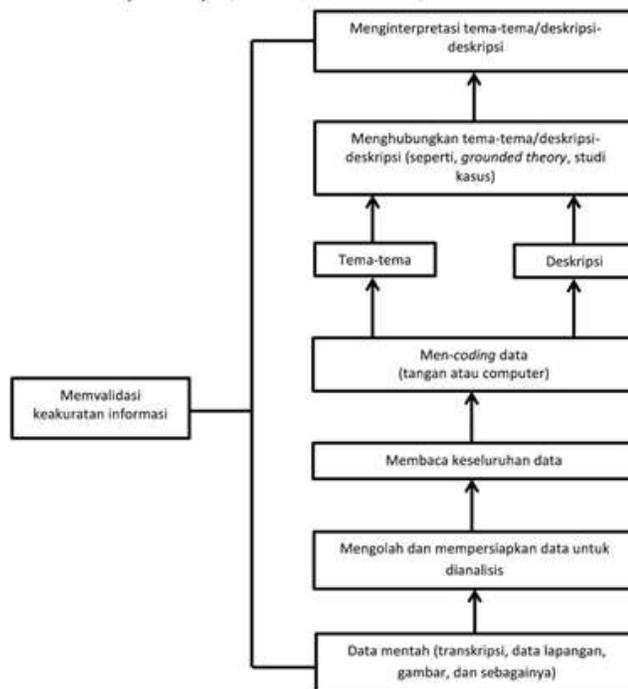
5. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data adalah suatu metode yang tidak hanya digunakan untuk membantah tuduhan terhadap validitas penelitian kualitatif yang dikatakan tidak ilmiah, tetapi juga sebagai tahap yang tak terpisahkan dari struktur pengetahuan dalam penelitian kualitatif.

- a. Triangulasi metode yakni pengumpulan data untuk melengkapi data wawancara dan observasi. Teknik yang digunakan peneliti yakni triangulasi metode. Sumber yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang dilakukan dengan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode triangulasi telah digunakan untuk tujuan mencapai validitas konvergen dan menguji tingkat validitas ekstra. Metode triangulasi dapat meningkatkan akurasi data dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang fenomena dari penelitian (Norman, K, 1978).

6. Metode Analisis Data

Creswell (Creswell, 2012) menyatakan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus dan memerlukan refleksi yang berkelanjutan terhadap data. Proses analisis data kualitatif disebut sebagai berkelanjutan karena tidak terbatas pada saat proses interpretasi data saja. Sebaliknya, analisis data kualitatif dapat terjadi sepanjang proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara simultan dan bersama-sama. Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis melalui serangkaian langkah berikut: a) Pengolahan dan persiapan data, b) Pembacaan keseluruhan data, c) Pencatatan data melalui proses coding, d) Penerapan proses coding untuk mengidentifikasi setting, kategori, dan tema, e) Menghubungkan tema/deskripsi yang telah diidentifikasi, f) Menafsirkan tema/deskripsi tersebut:



Gambar 1. 1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif (Creswell, 2012)

a. Pengolahan Persiapan Data

Pada tahap ini, proses yang dilakukan mencakup transkripsi wawancara, melakukan pemindaian (*scanning*) materi, mengetik data lapangan, serta melakukan penyortiran dan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang berbeda sesuai dengan sumber informasi.

b. Membaca Keseluruhan Data

Langkah ini merupakan tahap awal dalam membentuk pemahaman umum atas informasi yang diperoleh dari data yang telah terkumpul.

c. Men-Coding Data

Coding adalah proses mengelola materi atau informasi yang telah dikumpulkan menjadi segmen tulisan atau tanda-tanda tertentu sebelum memberikan makna atau interpretasi lebih lanjut.

d. Menghubungkan Tema-Tema/Deskripsi-Deskripsi

Pada langkah ini, tema-tema atau deskripsi yang telah diidentifikasi akan disampaikan kembali dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif. Dalam proses menghubungkan tema-tema atau deskripsi tersebut, peneliti menggunakan pendekatan naratif untuk menyampaikan hasil analisis. Pendekatan naratif ini dapat mencakup pembahasan mengenai kronologi peristiwa, tema tertentu, atau hubungan antar tema yang terlihat dari data yang telah dianalisis.

e. Menginterpretasi Tema-Tema/Deskripsi-Skripsi

Interpretasi dalam penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai proses memberikan makna atau pemaknaan terhadap sesuatu. Dalam melakukan interpretasi data, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Interpretasi dapat muncul sebagai hasil dari perbandingan antara temuan penelitian dengan informasi yang ditemukan dalam literatur atau teori yang telah ada sebelumnya. Selain itu, interpretasi juga dapat muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu dijawab selanjutnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari analisis data itu sendiri, bukan dari prakiraan atau perkiraan sebelumnya oleh peneliti.

